

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA

KCP AHMAD YANI NGANJUK

SKRIPSI



Oleh :

Nurmaika Nasyiati Mawadah

NIM: 402190252

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Nasyiati Mawadah, Nurmaika. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd

Kata Kunci: Penerapan, *Good Corporate Governance*, Kinerja Karyawan

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang kurang memadai menjadi penyebab terjadinya instabilitas keuangan yang berdampak pada memburuknya kinerja keuangan bank dan menyebabkan kegagalan implementasi GCG. Keadaan tersebut memaksa PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk untuk lebih meningkatkan penerapan GCG. Sehingga, hal ini berdampak positif bagi penguatan kepercayaan masyarakat dan peningkatan kinerja serta kemajuan perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metodologi pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi didukung dengan data sekunder yang bersumber dari website BSI Syariah. Data yang diperoleh kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk telah menerapkan 5 prinsip *Good Corporate Governance*, namun menurut penelitian lapangan terdapat kejanggalan pada indikator dalam prinsip akuntabilitas (tanggung jawab) setiap karyawan tidak menyelesaikan *job description*, tetapi membantu menyelesaikan tugas karyawan lainnya. Prinsip profesional lainnya berkisar dari indikator karyawan yang tidak disiplin hingga ketepatan waktu dan absennya rapat pagi yang mengakibatkan pekerjaan menjadi kurang optimal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JL Puspitasari Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang betanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Nurmaika Nasyiati Mawadah	402190252	Perbankan Syariah	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 3 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Muhtadin Amri, M.S.Ak

NIP. 198907102018011001

Menyetujui,

Pembimbing

Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd

NIP. 199602102020122028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

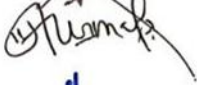
Naskah Skripsi Berikut Ini:

Judul : Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP
Ahmad Yani Nganjuk
Nama : Nurmaika Nasyiati Mawadah
NIM : 402190252
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Ely Masykuroh, M.SI
NIP 197202111999032003
Penguji I :
Nurma Fitriana, M.SM
NIP 198908062019032018
Penguji II :
Kenlies Era Rosalina Marsudi, M.Pd
NIP 199602102020122028

()
()
()

Ponorogo, ...2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. H. Lukli Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmaika Nasyiati Mawadah

NIM : 402190252

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi / Tesis : Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Nurmaika Nasyiati Mawadah

NIM 402190252

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmaika Nasyiati Mawadah

NIM : 402190252

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT BANK
SYARIAH INDONESIA KCP AHMAD YANI NGANJUK**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya

Ponorogo, 2 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Nurmaika Nasyiati Mawadah

NIM 40290252

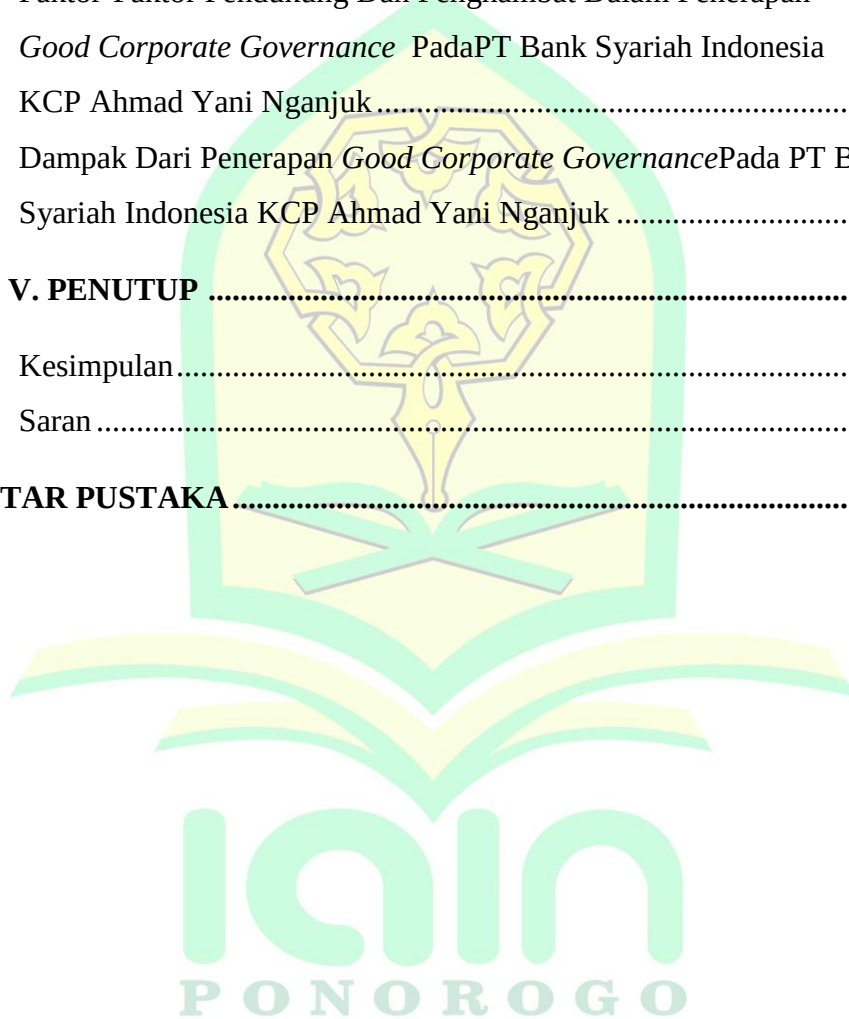
DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	22
2. Kehadiran Penelitian.....	24
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Data Dan Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Pengolahan Data.....	29
7. Teknik Analisis Data	31
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	31
9. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II. KAJIAN TEORI	35
A. <i>Good Corporate Governance</i>	35
1. Pengertian <i>Good Corporatae Govenance</i>	35
B. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	39
1. Transparansi (<i>Transparency</i>)	39
2. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	41
3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	43
4. Profesional (<i>Professional</i>)	44
5. Kewajaran (<i>Fairness</i>)	46
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	47
D. Dampak Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	49
E. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Islam	51
BAB III. PAPARAN DATA	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	57
2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia	59
3. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	60
B. Data	61
1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	61
2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	73
3. Dampak Dari Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada	

PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	76
BAB IV. PEMBAHASAN.....	80
A. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	80
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	87
C. Dampak Dari Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk	92
BAB V. PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah transaksi yang beroperasi di sektor jasa. Kepercayaan seluruh pemangku kepentingan penting bagi pengelola bank serta masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Mengingat peran bank dalam menghimpun dana masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat, hubungan antara bank dan nasabah merupakan salah satu kepercayaan dan hukum. Bank dapat mengoperasikan dan mengembangkan banknya hanya jika masyarakat percaya terhadap penggunaan produk perbankan yang ditawarkan. Kepercayaan masyarakat merupakan aset terpenting yang dapat disadap bank saat menerima dana dari masyarakat.¹

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi dari praktik-praktik yang mengkhawatirkan seperti mengandung unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan

¹Siti Wadiah, Rully, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009”, *Jurnal Nisbah* ,Volume 1, Nomor 2 (2015), 11.

pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah ataupun bentuk-bentuk usaha yang sudah ada sebelumnya.¹

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang kurang memadai merupakan akar dari ketidakstabilan keuangan yang berdampak pada memburuknya kinerja keuangan perbankan. Menurut laporan Bank Dunia, krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN dan melemahnya kinerja perbankan disebabkan oleh kegagalan implementasi GCG. Kegagalan implementasi GCG disebabkan oleh kerangka hukum yang lemah, kurangnya pengawasan oleh komisaris dan auditor, serta praktik perbankan yang buruk yang menyebabkan bank kehilangan kepercayaan publik.²

Tata kelola perusahaan adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan efektivitas dan mencakup berbagai hubungan antara tata kelola perusahaan dan konsep manajemen modern. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur untuk memfasilitasi arahan perusahaan dan saran untuk menetapkan metode pemantauan kinerja bagi perusahaan dengan konsep manajemen modern.³

¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 191.

²Aprianingsih, Astri, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan", *Jurnal Profita Edisi 4*, 2016. 22.

³Ignatius Edward Rianto, "Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan" *Binus Business Review*, vol.5. No. 1 (2014), 316.

Perkembangan industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan tentunya membutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Sistem pengelolaan lembaga keuangan syariah mengambil pendekatan yang berbeda dengan sistem perbankan pada umumnya. Hal ini karena lembaga keuangan syariah harus memastikan penerapan prinsip syariah dalam seluruh produk, perangkat operasional, praktik, dan manajemen perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah juga harus mengintegrasikan GCG dalam operasionalnya.⁴

Menurut tim Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengendalian dan pengaturan suatu perusahaan, yang tercermin dalam mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan (*hard definition*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 Mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yang merupakan dan menetapkan dasar hukum GCG di bidang perbankan bahwa GCG adalah bank. Manajemen yang menerapkan prinsip

⁴ Setyorini, H.B. dan Maria, E, Kandungan Nitrat dan Fosfat Di Pantai Jungwok, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, ISSN 1978–1652, Volume 13, Nomor 1, (2019), 87–93.

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajaran.⁵

Penerapan kelima prinsip dasar tersebut maka bank syariah wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan GCG. Selain itu dalam melaksanakan GCG, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah. Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.⁶

Penelitian yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) penting untuk diteliti sebab dampak yang timbul karena kurang

⁵ PBI, *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: BI, 2009), 244.

⁶ Rivan Abdurrahman, Rully Trihantana, "Persepsi Praktisi Perbankan Syariah Mengenai Penerapan Teknologi Preauthorized Debit sebagai Fee Based Income pada Bank Syariah", *Jurnal Nisbah*, Volume 1 nomor 2, (2016), 235.

efektifnya penerapan GCG ini sangat banyak, tidak hanya untuk lembaga, perusahaan akan tetapi bisa negara sekalipun.

Alasan peneliti memilih Bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sebagai lokasi penelitian yaitu sebelum memilih lokasi peneliti telah melakukan observasi lapangan pada saat melakukan kegiatan magang di PT Bank tersebut. Peneliti melihat bahwa PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah menerapkan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajaran. Namun ada beberapa prinsip yang belum efektif yaitu pada prinsip akuntabilitas pada indikator masing-masing karyawan tidak menyelesaikan *job description* tetapi malah membantu menyelesaikan tugas karyawan lainnya, prinsip profesional pada indikator karyawan yang tidak disiplin perihal disiplin waktu serta ketidakhadiran ketika apel pagi berlangsung sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak bisa maksimal.⁷ Karena fakta penelitian yang didapat tidak sesuai GCG dengan realita disana dan ada beberapa hal yang belum diterapkan secara maksimal oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian disana.

Dari masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti di Bank tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi penelitian agar ruang lingkup yang dipelajari jelas. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan

⁷Wawancara, Kepala BSI Ahmad Yani Nganjuk

judul “**Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diambil suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk?
3. Bagaimana dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.
3. Untuk menganalisis dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Keilmuan (Teoritis)

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan pada khususnya menambah khazanah keilmuan dalam bidang *Good Corporate Governance* serta dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran-pemikiran bagi dunia pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan serta memberikan penjelasan secara rinci mahasiswa tentang penerapan prinsip GCG dapat memberikan dampak besar untuk PT Bank Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Terapan (Praktis)

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja dan nilai perusahaan serta diharapkan dapat menjadi referensi terutama dalam bidang perbankan, dan mendorong penelitian yang lebih lanjut mengenai GCG.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai penerapan GCG Pada Bank Syariah di Indonesia.

c. Bagi Bank KCP Ahmad Yani Nganjuk

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Diantaranya, bagi para investor penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan syariah dengan memperhatikan hasil penerapan GCG. Bagi para pemegang saham dan manajemen perbankan syariah, sebagai masukan dalam mengembangkan praktik GCG berdasarkan perspektif Islam. Bagi nasabah perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi para nasabah bank syariah untuk menilai kinerja suatu perusahaan dengan melihat hasil penerapan prinsip *sharia governance*. GCG juga memperkuat sistem manajemen organisasi dan kepemimpinan sehingga akan membuat suasana kerja yang baik dan profesional. GCG juga akan membuat kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal bank syariah atau perusahaan.

d. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan perpustakaan dalam kajian ilmu Perbankan Syariah yang berkaitan dengan Penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia Nganjuk.

E. Studi Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Ermawati dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada KSPSS Berkah Mitra Hasanah Studi Kasus Pada KSPSS Berkah Mitra Hasanah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG di KSPSS Berkah Mitra Hasanah sudah terlaksana, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian implementasi *Good Corporate Governance* pada KSPSS Berkah Mitra Hasanah dalam penerapan prinsip GCG menurut perspektif ekonomi islam dapat disimpulkan bahwa KSPSS Berkah Mitra Hasanah telah menerapkan *Good Corporate Governane* dengan versi budaya dalam kinerja tata kelola pada KSPSS Berkah Mitra Hasanah yaitu *Siddiq* yang unsur tersebut merupakan prinsip islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG yang merupakan bagian dari sistem syari’ah yang dilaksanakan secara baik dan profesional. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang

sedang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel dengan menggunakan *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu pada lokasi penelitiannya dengan memilih KSPPS Berkah Mitra Hasanah yang beralamatkan di Jl. Wolter Monginsidi No. 39 Genuk Semarang.⁸

2. Skripsi, Nasution dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Muamalat KC Medan Balai Kota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat secara umum sudah dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik, dan sudah dapat melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggung jawaban), secara umum hanya perlu meningkatkan penerapan GCG tersebut agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Namun Bank Muamalat terus berupaya menjadi bank terbaik dan berasaskan prinsip syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang sedang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian ini di Bank Muamalat KC

⁸Elly Ermawati “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kspps Berkah Mitra Hasanah Studi Kasus Pada Kspps Berkah Mitra Hasanah” Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisns Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019).

Medan Balai Kota yang berlokasi di Jl. Balai Kota No. 10 D-E Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.⁹

3. Skripsi, Muslimah dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan GCG pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok kelapa diwujudkan dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajiban, serta berdasarkan syariat Islam di terapkan sifat *shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah*. Dalam penyelesaian risiko yang terjadi melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengelolaan risiko. Selama pandemi Covid-19 BMT memberi kebijakan bahwa tidak melakukan pencairan. Jadi meminimalisir uang keluar dan hanya menerima pengangsuran dari nasabah. Dalam hal ini BMT mengurangi pengeluaran dan pembiayaan distop selama pandemi. Untuk menyelesaikan risiko kredit macet BMT mengelola berdasarkan prinsip GCG dan syariat Islam yaitu Kewajiban dan *shiddiq*. Dimana BMT menjunjung moralitas yang tinggi dalam penyelesaian risiko kredit, tetap berpedoman dengan mengedepankan cara-cara yang

⁹Jamilah Nasution “Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Muamalat Kc Medan Balai Kota” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2020).

diperkenankan dalam islam, yaitu dengan cara non litigasi (menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan) mengedepankan asas kekeluargaan tanpa menggunakan kekerasan. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang sedang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel dengan menggunakan *Good Corporate Governance*. Dan perbedaan yang muncul yaitu menggunakan manajemen risiko, dan pada lokasi penelitian dengan memilih BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa di JL. Srikaton RT. IV No. 78 Dusun II Desa Srikaton kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.¹⁰

4. Skripsi, Astuti dengan judul “Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Bni Syariah KCP Langkat Stabat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah KCP Langkat Stabat sudah melaksanakan prinsip GCG yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, pertanggungjawaban, dan kewajaran atau keadilan. Namun ada beberapa prinsip yang belum efektif yaitu pada prinsip transparansi pada indikator visi dan misi bank yang tidak tertera pada laman website BRI Syariah KCP Langkat Stabat, prinsip akuntabilitas pada indikator perincian tugas dan tanggung jawab

¹⁰ Siti Musimah “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2021)

karyawan yang masih terdapat perangkapan job, dan prinsip kewajaran pada indikator kesempatan karyawan dalam pelatihan kerja namun tidak terlaksanakan. Adapun kendala yang muncul, diantaranya kurang unggulnya teknologi informasi, kurangnya kesadaran karyawan dalam melaksanakan prinsip GCG, kurangnya jumlah karyawan bank, pihak nasabah yang terkadang melakukan pelanggaran seperti kredit macet, kurangnya waktu dalam hal training bagi karyawan baru sehingga kurang maksimal pelaksanaan GCG. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang sedang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaan yang muncul yaitu menggunakan analisis penerapan, dan pada lokasi penelitiannya dengan memilih Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat yang beralamatkan di Jl. Proklamasi No. 1 Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20732, Telepon: 618910707.¹¹

5. Skripsi, Nahriyah dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Reformasi Birokrasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG yang diterapkan

¹¹Wahyu Indri Astuti “Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Bni Syariah Kcp Langkat Stabat” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara”, (2021).

untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah mampu berjalan dengan optimal dengan kriteria sebagai berikut: selalu menanamkan nilai-nilai budaya kerja pada setiap diri pegawai, fokus dengan satu visi dan misi dalam membangun sistem pemerintahan yang baik serta mampu melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu fokus penelitian ini meningkatkan reformasi birokrasi, dan pada lokasi yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berada di Jalan Ki Mangun Sakoro No 43 A Yogyakarta 55119 sebelah selatannya SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta.¹²

6. Jurnal, Tyas dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga PT. X”. Hasil penelitian ini adalah perusahaan telah menerapkan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prinsip GCG. Perusahaan diharapkan untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip dan menjalankan prinsip-prinsip yang belum sepenuhnya dijalankan.

¹²Rizqi Maknunatun Nahriyah “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Reformasi Birokrasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2017” Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, (2019).

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu menggunakan analisis penerapan, dan pada lokasi yaitu perusahaan keluarga PT. X dan bergerak di bidang konveksi yang memproduksi tekstil.¹³

7. Jurnal, Soekarno dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa/kelurahan Dinoyo secara normatif sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi tata kelola yang baik di lembaga pemerintah desa khusus dalam pemerintahan desa. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu menggunakan analisis serta fokus pada pengelolaan dana Desa, dan

¹³Novia Sarwoning Tyas “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga Pt. X” Jurnal EkonoI dan Manajemen Sistem Informasi Volume 1 Nomor 3, (2020).

pada lokasi yaitu Kelurahan Desa Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.¹⁴

8. Jurnal, Hardika dengan judul “Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Bank Central Asia Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan umum prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas dan keadilan pada PT Bank Central Asia Tbk dilakukan sudah cukup baik meskipun masih ada kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi PT Bank Central Asia Tbk adalah kendala pengetatan kredit perbankan, produk bank belum produktivitas sepenuhnya efisien dan efektif, standar sumber daya manusia yang tinggi sebagai akibat dari globalisasi dan masalah kasus penipuan internal. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu menggunakan analisis, pada objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan, dan lokasi penelitian.¹⁵
9. Jurnal, Ningseh dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat

¹⁴ Adrian Soekarno “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang” Jamswap: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume 4 Nomor 4, (2019).

¹⁵ Istifar Dilla Hadistya, Mutia Hardika “Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Bank Central Asia Tbk” Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 2, (2021)

Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian Penerapan GCG pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Transparansi telah diimplementasikan dengan pembuatan kebijakan yang dilakukan secara tertulis dalam syariat islam hal tersebut dituliskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Akuntabilitas diimplementasikan dengan Bank Muamalat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan transparan dan wajar dalam pengimplementasian tersebut Bank Muamalat telah berpedoman pada Q.S. An-Nisa ayat 58 dan Q.S. Az-Zumar ayat 9. Responsibilitas diimplementasikan dengan melakukan tanggung jawab sosial, Pada penerapannya Bank Muamalat telah menjalankan usahanya sejalan dengan ajaran agama Islam yakni salah satunya melalui program CSR yang dimiliki dengan berbagi kepada sesama melalui Baitul Mal. Profesional dalam pengimplementasiannya telah didasarkan pada hadits Abu Ya’la dan di-shahih-kan oleh Albani dan Bank Muamalat berhasil melakukan itu dapat dilihat dari dewan komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga. Kewajaran dan kesetaraan pada pengimplementasiannya bank muamalat berpedoman pada Q.S. An-Nahl ayat 90 sehingga bank Muamalat dalam mengambil keputusan setiap pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang sama. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel

independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu pada analisis dan lokasi penelitiannya.¹⁶

10. Jurnal, Herlyanto dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah Dalam Mencapai *Maqashid* Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola bisnis syariah dalam jumlah 93% belum berdampak pada pencapaian *maqashid* syariah secara keseluruhan selama 2015-2017. Jika dilihat berdasarkan pada masing-masing tujuan, penerapan tata kelola bisnis syariah akan berdampak pada tercapainya keadilan. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen GCG. Perbedaan yang muncul yaitu pada analisis serta fokus penelitian yaitu mencapai *maqashid* syariah.¹⁷
11. Jurnal, Bintoro dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung untuk meraih WBK/WBBM adalah faktor

¹⁶Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia” Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Volume 5 Nomor 2, (2021).

¹⁷Fredy Dwi Herlyanto “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah Dalam Mencapai *Maqashid* Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” El Muhasaba: Jurnal Akuntansi Volume 11 Nomor 1, (2020)

kepemimpinan dan budaya organisasi dimana sosok pimpinan menjadi panutan atau role model yang menggerakkan perilaku individu untuk dapat meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu pada analisis serta fokus reformasi birokrasi, dan lokasi penelitian.¹⁸

12. Jurnal, Lestari dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance*. Pada System Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah cukup baik dalam menerapkan GCG dalam sistem pelaporan keuangan dengan prinsip yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Penerapan GCG dalam sistem pelaporan keuangan, menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki sistem pelaporan yang transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para muzakki untuk membayarkan zakat ke BAZNAS. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa

¹⁸Deviyanti, Kusumo Bintoro “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM)” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Volume 6 Nomor 6, (2021)

yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu pada analisis serta fokus mengenai system pelaporan keuangan, dan lokasi penelitian di BAZNAS kabupaten kebumen.¹⁹

13. Jurnal, Dewi dengan judul “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterapkannya GCG di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi Bank untuk dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan *dividen* dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka memberikan kenyamanan dan aman para nasabah dan investor dalam berinvestasi dalam perbankan syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel *independen Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu lokasi penelitian di lembaga perbankan syariah.²⁰

¹⁹Livia Ambarsari, Koiirul Anwar, Setyo Budi Hartono, Harwening Sindu Lestari “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance*” Jurnal At-Taquddum Volume 12 Nomor 2, (2020).

²⁰Putri Indar Dewi “Penerapan *Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah*” Jurna At-Tsarwah Volume 3 Nomor 2, (2020)

14. Jurnal, Cahyadini dengan judul “Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan *Participating Interest*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan GCG pada BUMD, dapat meningkatkan kinerja pimpinan BUMD sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu pada lokasi penelitian.²¹
15. Jurnal, Rizayusmanda dengan judul “Urgensi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kegiatan Perbankan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perbankan syariah dalam menerapkan kegiatan usahanya yaitu mempersiapkan: Sumber Daya Manusia yang siap pakai, struktur organisasi perusahaan, pembagian pekerjaan, tugas dan wewenang pekerjaan, dan bidang-bidang lain. Kemudian perbankan syariah bekerja sama dengan MUI mengadakan sosialisasi ke masyarakat, serta perbankan syariah sering menjadi sponsor kegiatan keagamaan. Prinsip GCG merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan

²¹Zahra Shafira Belanusa, R Kartikasari, Amelia Cahyadini “Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan *Participating Interest*” Jurnal Jurisprudence Volume 10 Nomor 1, (2020)

bagi kegiatan usaha perbankan syariah dan unit usaha syariah. Hal ini ditujukan dengan adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank agar benarbenar mematuhi ketentuan perbankan syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan pada penelitian ini pada variabel independen *Good Corporate Governance*. Perbedaan yang muncul yaitu pada lokasi penelitian.²²

Apabila dilihat dari judul besarnya, hampir sama. Namun, dalam segi pembahasan yang diteliti berbeda dengan skripsi lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada pokok permasalahan yang dikaji. Karena penelitian ini penulis menitikberatkan mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk dalam menerapkan GCG. Demikian tinjauan pustaka ini dilakukan sebagai perbedaan materi antara apa yang penulis teliti dengan skripsi terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu kegiatan yang mengkaji latar belakang interaksi individu, sosial, kelompok, kelembagaan atau masyarakat.²³ Pengumpulan data dilakukan melalui

²²Rizayusmanda “urgensi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kegiatan Perbankan Syariah” Volume 18 Nomor 1, (2020).

²³Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

pengamatan lapangan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.²⁴

Objek penelitian ini adalah Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk melalui pengamatan dan implementasi secara langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang individu atau perilaku yang diamati.²⁵ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikan menggambarkan Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

Penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti meliputi kutipan data yang memberikan gambaran tentang penyajian. Bahan penelitian dapat diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia KCP A Yani Nganjuk.

²⁴Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Volume 13, Nomor 1, (2017), 41.

²⁵Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini maka penulis terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrument kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan dimana objek penelitian, sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrument kunci, dengan itu peneliti dilapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir dilapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang diteliti adalah PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 199, Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur. Alasan dipilihnya lokasi ini karena peneliti menemukan gap dalam penerapan GCG bank ini. Kemudian peneliti juga tertarik dengan konsep GCG yang akhir-

akhir ini semakin mendapat perhatian publik karena GCG memperjelas dan memperkuat hubungan antara pemangku kepentingan organisasi, seperti peran karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Kajian dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk, karena belum adanya penerapan prinsip GCG di bank tersebut dikarenakan adanya kekurangan yang muncul. Sehingga peneliti ingin mengetahui prinsip-prinsip GCG apa yang mereka terapkan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh penulis dari hasil observasi subjek dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan hasil observasi dan wawancara. Setelah semua informasi terkumpul, peneliti menyusun data untuk analisis. Data adalah deskripsi atau bahan nyata yang digunakan sebagai dasar penelitian (analisis atau kesimpulan).²⁶ Untuk mempermudah penelitian ini, penulis mencoba menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi diinginkan, yaitu: tentang penerapan GCG pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

²⁶ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*, (Malang: UM Press, 2008), 41.

b. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik individu maupun perorangan melalui wawancara serta observasi. Secara sistematis mengamati dan mencatat masalah yang dihadapi. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah *Branch operations & service manager, Customer Service, Teller*. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁸ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu dokumen dari sumber internal PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan

²⁷Saifuddin Awar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 91.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 296

informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses melihat, mengamati, dan menelaah serta mereka secara sistematis perilaku dalam kaitannya dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, dan peristiwa. Observasi merupakan metode dimana informasi diperoleh langsung dari objek yang diteliti dilapangan. Pengamatan dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan, khususnya di bank, yang merupakan tujuan utama kajian dan analisis atas aktivitas yang dikaji sesuai penerapan GCG.

Penulis melakukan observasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk. Metode observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan observasi, dan peneliti melihat apa yang diterapkan pada pegawai bank.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dimana informasi dipertukarkan melalui kegiatannya jawab untuk mencapai kesimpulan tentang topik tertentu. Ada 3 jenis

wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).²⁹ Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap pengumpulannya hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu kepada karyawan PT BSI KCP KCP Ahmad Yani Nganjuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah lembaran berupa tulisan, gambar, sejarah atau sketsa. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.³⁰ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang struktur organisasi PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

Dokumen dalam bentuk karya, seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian dokumenter melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231-233.

³⁰Ibid., 240.

penelitian kualitatif.³¹Data yang diperlukan oleh penulis antara lain profil PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk, hasil prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan serta rangkaian kegiatan terkait yang dilakukan pada Bank ini.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu kegiatan meringkas, memilih hal pokok, memfokuskan pada suatu hal yang penting untuk selanjutnya mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat pengumpulan data lebih mudah bagi peneliti.³² Dalam penelitian ini, penulis merangkum informasi dari pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk tentang penerapan GCG.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Informasi yang telah direduksi tersebut kemudian disajikan, dimana informasi tersebut disajikan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dari hasil reduksi dapat disusun atau dikelompokkan sehingga dapat dipahami dalam suatu pola atau urutan.³³

³¹Ibid

³²Sugiyono, *Metode Penelitian, , Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)247.

³³Gunawan, *'Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik'*,(Jakarta: Bumi Aksara,2014.),

Pada saat melakukan penyajian data, informasi belum dibuat untuk menggambarkan secara naratif, tetapi dengan proses analisis terus menerus sampai data dapat ditarik kesimpulan.³⁴ Dalam hal ini, data yang akan disajikan berupa keterangan pihak narasumber terkait penerapan GCG pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

c. Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan adalah kegiatan meninjau kembali informasi yang diterima untuk menentukan apakah sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya.³⁵ Data yang ditinjau adalah untuk kelengkapan, kejelasan makna dan keserasian antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji informasi yang diperoleh dari berbagai buku literatur tentang penerapan GCG sebagai sumber teori pada masalah penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan terkini, yang mungkin berupa deskripsi objek yang tidak jelas, hubungan interaktif atau kausal, dan teori. Dalam penelitian ini, penulis

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.

³⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 50

menarik beberapa kesimpulan untuk mengatur pengumpulan data secara berurutan dari awal hingga akhir dalam lingkungan tertentu.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses menyusun data diperoleh dari praktik, berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan lainnya, disusun secara sistematis agar temuan diketahui dan mudah dipahami oleh orang lain.³⁶ Dalam penelitian ini, metode analisis data deduktif digunakan sebagai metode analisis data. Metode deduktif adalah kegiatan menganalisis data berdasarkan teori dan kemudian menggambarkan hal-hal berdasarkan fakta umum subjek untuk mencapai kesimpulan khusus.³⁷ Setelah mendapatkan data penelitian, penulis menganalisis penerapan GCG, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan GCG, dan dampak penerapan GCG pada Bank Syariah untuk memastikan sudah atau belum sesuai dengan teori yang digunakan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengecek kebenaran data adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan beberapa teknik

³⁶ Pritandhari, Meyta dan Triani Ratnawuri. "Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi (Monokomi) pada Siswa *Boarding School*." *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Volume 6. Nomor 2. 2018, 244.

³⁷ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

pengumpulan data..³⁸ Triangulasi data adalah bentuk verifikasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk membandingkan data penelitian.³⁹ Teknik triangulasi dilakukan dengan memverifikasi hasil penelitian menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu. Wawancara, observasi atau dokumentasi sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan terhadap materi dapat dianggap valid.

Keabsahan data penelitian ini didasarkan pada teknik triangulasi sumber. Teknik verifikasi data melibatkan verifikasi informasi dari berbagai sumber. Peneliti kemudian menganalisis informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan, yang kemudian meminta persetujuan dari tiga sumber yang berbeda (konfirmasi anggota).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang rantai pembahasan penelitian ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini. Kajian ini dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian,, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) 253.

³⁹Meyta Pritandhari dan Triani Ratnawuri, "Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi(Monokomi) pada Siswa *Boarding School*," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2 (2018), 103.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab kedua adalah *Good Corporate Governance* yang berisi teori-teori tentang GCG yang harus diimplementasikan sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan oleh para ekonom dan tinjauan literatur (penelitian sebelumnya).

BAB III: PAPARAN DATA

Bab ketiga dikhususkan untuk data penelitian, yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan informasi, teknik pengumpulan data, teknik pengendalian keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik data.

BAB IV: PEMBAHASAN/ANALISIS

Dalam bab ini data disajikan dan dianalisis. Data yang disajikan merupakan data lapangan yang ditentukan oleh peneliti dipaparkan pada Bab 4 untuk membuat analisis mengenai penerapan tata kelola yang baik di Bank Syariah KCP Ahmad Yani Nganjuk.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima, pada bab kelima inilah akhir dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis atas

topik yang dibahas dalam penelitian ini dan dimaksudkan untuk menjadi masukan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.



BAB II

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian

Bank Syariah sebagai sebuah institusi memiliki perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian di mana semua operasinya tunduk pada kepatuhan Syariah. Oleh karena itu, penerapan GCG di lembaga perbankan syariah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri. Penerapan GCG di sektor perbankan syariah harus didasarkan pada lima prinsip dasar, yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian dokumen dan informasi terkait, dan keterbukaan dalam proses penyampaian keputusan. Kedua, akuntabilitas khususnya kejelasan fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban otoritas perbankan agar pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, tanggung jawab, yaitu kepatuhan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yang baik. Keempatnya adalah profesional yaitu kompeten, objektif dan kebal terhadap pengaruh dan tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan bank syariah. Kelima, fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam

pelaksanaan hak-hak pihak terkait berdasarkan kesepakatan dan hukum yang berlaku. (PBI No.33/11/PBI/2009).¹

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah GCG diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²

Brown dan Caylor menyatakan bahwa GCG adalah sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan untuk menyediakan dan meningkatkan nilai bisnis kepada para pemegang saham.³ Lanjut Laksana menyatakan bahwa GCG juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku

¹PBI, *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: BI, 2009), 257.

² Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008), 48.

³ Brown, L., & Caylor, M., "Corporate governance and firm valuation". *Journal of Accounting and Public Policy*, Volume 2, Nomor 5, (2006), 409-434,

kepentingan internal dan eksternal lainnya sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka.⁴

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal, pihak lain mengenai hak dan kewajiban mereka atau hal-hal lain. sistem kata-kata untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.⁵

GCG adalah proses dan struktur untuk mengelola bisnis perusahaan dan urusan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama untuk mencapai nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.⁶

Corporate governance merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan

⁴Laksana, M. W, *Psikologi Komunikasi; Membangun Komunikasi yang Efektif Dalam Interaksi Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 215

⁵FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, Jilid Kedua (Jakarta: Seri Tata Kelola Perusahaan, 2000), 56.

⁶Rusdiyanto, Susetyorini, dan Elan, Umi, *Good Corporate Governance*. Cetakan Pertama. (Bandung : PT Refika Aditama, 2019),73-74.

terkoordinasi. Kebutuhan akan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen bank. Kebijakan *good governance* harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan.⁷

GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai secara umum nilai etika yang berlaku.⁸GCG adalah proses dan struktur bisnis serta urusan bisnis lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan tanggungjawab perusahaan, dengan tujuan utama mencapai nilai perusahaan yang optimal dalam jangka panjang dan memperhatikan kepentingan pihak lain.

Maka dari beberapa pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola perusahaan dimana perusahaan menerapkan segala prinsip yang ada untuk memenuhi segala hak dan memenuhi berbagai

⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko* (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2016), 104.

⁸Kusmayadi, Dedi, Rudiana, Dedi, dan Badruzaman, Jajang, *GoodCorporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015),11.

kewajiban, sehingga terdapat keselarasan yang baik dalam korporasi yang terlihat melalui citra perusahaan yang baik.

B. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah tata kelola perbankan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kewajaran. Implementasi GCG di Indonesia harus didasarkan pada lima prinsip dasar yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan penjelasan sebagai berikut:⁹

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan (*transparency*), pengertian prinsip keterbukaan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰ Menurut OECD konsep GCG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan,

⁹Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital*.(Yogyakarta: Salemba Empat, 2018), 294.

¹⁰ Siti Wadih, Rully dkk, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009, Jurnal Nisbah, Volume 1 Nomor 2, (2015). 50

kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang diungkapkan adalah posisi keuangan, hasil keuangan, kepemilikan dan manajemen perusahaan. Audit informasi dilakukan pada informasi yang dilakukan secara independen. Pengungkapan dilakukan agar pemegang saham dan lainnya mengetahui keadaan bisnis sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham.¹¹

Prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi material, informasi harus disiapkan, diverifikasi dan diungkapkan sesuai akuntansi yang baik, penyebaran informasi harus adil, tepat waktu dan efektif. Untuk meminta pengelola bank syariah bertanggung jawab sebanyak mungkin atas keamanan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh pelanggan.¹²

¹¹Amman, dan. M. Schmid, "Corporate Governance and Firm Value: International Evidence", *Journal of Fianancial Intermediation*, Volume 5, nomor 1, 2010, 1-51.

¹²Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 60.

Prinsip transparansi merepresentasikan keterbukaan dalam penyampaian informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk melaksanakan prinsip ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingannya. Informasi yang akan diberikan adalah posisi keuangan, hasil keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Informasi disebarluaskan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat.

2. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**

Pertanggungjawaban (*responsibility*), Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, kewajiban adalah kepatuhan manajemen bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan bank yang baik.¹³ Sedangkan menurut OECD, responsibilitas adalah tanggung jawab direksi atas manajemen, pengawasan manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka tata kelola perusahaan, yang harus mengatur

¹³Siti Wadiah, Rully dkk, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009*, Jurnal Nisbah, Volume 1 Nomor 2, (2015). 50

pengakuan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan hukum dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Lembaga ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi kelangsungan sosial dan bisnis. Dengan menerapkan prinsip ini dimaksudkan agar perusahaan menyadari bahwa dalam operasionalnya juga memiliki peran yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

Prinsip tanggung jawab ini antara lain menjamin hak-hak pihak yang berkepentingan, berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.¹⁴

Pertanggungjawaban adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yang baik. Adanya tanggung jawab administratif dalam manajemen, pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Menerapkan prinsip ini, perusahaan harus menyadari bahwa

¹⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 60.

perusahaan juga berperan dalam kegiatan operasionalnya untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan menjamin hak-hak pemangku kepentingan.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab instansi di bank untuk kegiatan manajemen yang efektif.¹⁵ Menurut OECD prinsip dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsep GCG harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Jika prinsip ini diterapkan secara efektif, akan ada kejelasan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tanggung jawab antara pemegang saham, direksi dan direksi. Prinsip akuntabilitas

¹⁵ Siti Wadih, Rully dkk, Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009, Jurnal Nisbah, Volume 1 Nomor 2, (2015). 55

ini mencakup mengingatkan anggota dewan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham, independensi dalam penilaian di luar manajemen, dan akses informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Padahal, perbankan syariah juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah agar tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁶

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban badan perbankan agar pengelolaan berjalan efektif, dalam hal ini perbankan syariah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Jika dilaksanakan secara efektif, tugas, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemegang saham, direktur dan dewan direksi akan diperjelas.

4. Profesional (professional)

Profesional (*professional*), Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, berkualitas profesional, mampu bertindak objektif

¹⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 63

dan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) dan berkomitmen kuat terhadap pengembangan perbankan syariah.¹⁷

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perbankan syariah harus dikelola secara profesional atau tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain untuk menghindari konflik kepentingan sebanyak mungkin. Demikian sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

Prinsip ini juga mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari tekanan atau campur tangan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini mengharuskan bertindak secara independen sesuai dengan peran dan fungsi yang tersedia bagi mereka tanpa tekanan. Prinsip ini menyiratkan bahwa para pemimpin bisnis harus terus memastikan bahwa hak pemangku kepentingan diakui dalam undang-undang dan peraturan perusahaan.

¹⁷Siti Wadiah, Rully dkk, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009*, Jurnal Nisbah, Volume 1 Nomor 2, (2015). 57

5. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam melaksanakan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¹⁸

Menurut FCGI, prinsip kewajaran ini mencakup perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, perilaku dan/atau kebijakan perusahaan, khususnya terhadap pemegang saham minoritas dan asing, dengan pengungkapan informasi material dan dilarang keras untuk dibagikan kepada pemilik dan perdagangan saham oleh orang dalam. (pertukaran interior). Prinsip ini diwujudkan dalam mengembangkan kebijakan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman kebijakan yang melindungi perusahaan dari perdagangan orang dalam dan benturan kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan pengawas, direksi dan komite, termasuk sistem kompensasi, presentasi yang adil, informasi atau pengungkapan penuh dokumen apa pun, memprioritaskan kesetaraan kesempatan kerja.

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan

¹⁸Ibid., 79.

yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Good Corporate Governance*

Untuk mencapai visi dan misi suatu perusahaan, sangat tergantung pada implementasi tata kelola perusahaan di setiap departemen dan organisasi. Namun demikian, terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung kelancaran operasionalnya serta faktor-faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya kepemimpinan masing-masing perusahaan. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi.

Faktor-faktor yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan antara lain:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah beberapa faktor dari luar perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, antara

lain: (Pertama), adanya sistem hukum yang baik untuk menjamin penerapan hukum yang seragam dan efektif. (Kedua) dukungan terhadap implementasi GCG oleh sektor publik/organisasi pemerintah juga harus mengimplementasikan GCG. (Ketiga), terdapat contoh-contoh GCG yang sesuai dan dapat menjadi standar penerapan GCG yang efektif dan profesional.

2. Faktor Internal

Tujuan dari faktor internal tersebut adalah untuk mendukung keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang bersumber dari dalam perusahaan. Faktor-faktor yang disebutkan antara lain: (Pertama), adanya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem pengelolaan kerja di perusahaan. (Kedua), berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan terkait penerapan nilai-nilai GCG. (Ketiga), pengelolaan pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada prinsip-prinsip standar GCG. (Keempat), adanya sistem audit yang efektif di perusahaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi. (Kelima), informasi yang transparan agar masyarakat dapat memahami setiap gerak, setiap tahapan pengelolaan perusahaan sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti setiap tahapan perkembangan dan pergerakan perusahaan pada setiap periodenya.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan *Good Corporate Governance* antara lain:

a. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap tidak terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, yaitu tidak adanya acuan dalam penerapan tata kelola yang baik dalam bisnis yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam. .

b. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap tidak terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, antara lain belum adanya standar struktur rantai kompetensi, hak dan tanggungjawab yang berintegritas dalam struktur organisasi perusahaan.¹⁹

D. Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Salah satu dasar penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai

¹⁹Klapper dan Innesa, "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". Journal of Corporate Finance. Vol. 10No. 5, 2004. 710

perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai. *Corporate governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*.²⁰ Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang didukung dengan regulasi yang baik, diharapkan akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan.

Salah satu prinsip *corporate governance* yang utama adalah transparansi, menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan harus menerapkan pilar-pilar *Good Corporate Governance* yang salah satu pilar utamanya adalah transparansi.²¹

²⁰Lastanti, Hexana Sri, "Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar". (Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun *Good Corporate Governance*, 2004). 41

²¹Hastuti, Theresia Dwi. Hubungan antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta), (*Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 2005) 41

Baik buruknya GCG perusahaan di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada perusahaan tersebut. Dari kelima komponen pengendalian intern, komponen *control environment* atau lingkungan pengendalian, merupakan pondasi dari komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi objektif yang ada pada organisasi, karena sangat mendasarnya komponen lingkungan pengendalian sebagai aspek pengendalian intern maka penerapan GCG sangat besar kaitannya dengan kinerja perusahaan. Kondisi ini ditentukan oleh pimpinan organisasi, di mana lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dan kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia.²²

E. *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Islam

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Secara umum, pandangan Islam menyatakan bahwa tujuan utama suatu bisnis adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Dalam konteks GCG dalam Islam, beberapa penelitian telah dilakukan, khususnya pada

²²Arens, A.A., Elder R.J., Beasley M.S., dan Jusuf A.A. *Auditing And Assurance Services, An Integrated Approach*, 12th ed., (Pearson Prentice Hall: Jakarta, 2008) 42

lembaga keuangan Islam, dan telah menemukan alternatif model tata kelola perusahaan. Kajian tersebut mengacu pada model tata kelola perusahaan berbasis konsultatif yang menekankan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yaitu tauhid atau keesaan Allah. Choundry dan Hoque menyatakan bahwa pendekatan GCG terhadap Islam didasarkan pada model *epistemologi monoteisme*, di mana peran fungsional bisnis beroperasi melalui aturan Syariah. Prinsip tauhid bersumber dari konsep penting prinsip keadilan atau keseimbangan (*al-'adl wal ihsan*). *Stakeholder* sebagai khalifah Allah memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip pemerataan distributif melalui proses permusyawaratan. Unsur diskusi memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam urusan publik, termasuk kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya.²³

Umar M. Chapra dalam *Islam and Economic* menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim sebagian besar menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat hubungannya dengan GCG, karena lebih menekankan pada bagi hasil (*profit sharing*)

²³Najmudin, *Manajemen Keuangan: Akuntansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 54-56.

yang berarti lebih menonjolkan aspek *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis.²⁴

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan bahkan misi utama Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka menyebarkan (*tabligh*) ajaran tauhid, khususnya bisa mengajak manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan dan tunduk kepada-Nya. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat penting karena mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan antar manusia (hubungan horizontal), mereka sama pentingnya dengan hubungan antar manusia, hubungan mereka dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam artian manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan keadilan sosial bersumber dari Al-Qur'an.²⁵

Sementara itu, beberapa prinsip syariah yang mendukung penerapan GCG atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini adalah bagian dari sistem Syariah. Implementasi sistem syariah di bank syariah dapat dilihat dari dua (dua) sudut, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dari perspektif makro mengharuskan semua dana yang terkumpul dalam sistem perbankan

²⁴Eng. Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 173

²⁵Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi islam*, (Jl Sultan Alauddin:AlauddinUniversity Press,2014),38-39.

syariah dikelola dengan integritas dan kehati-hatian yang ekstrim, antara lain:

1) Shiddiq

Memastikan pengelolaan bank syariah dilakukan dengan etika yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengutamakan cara-cara yang halal (halal) dan menghindari cara-cara yang meragukan (subhat), terutama cara-cara yang dilarang (haram).

2) Tabligh

Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip, produk dan layanan perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatan sosial sebaiknya tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat bagi pengguna layanan perbankan syariah.

3) Amanah

Berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari pemilik dana (*sahibul maal*) sehingga terjalin rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana swasta (*mudharib*).

4) Fatanah

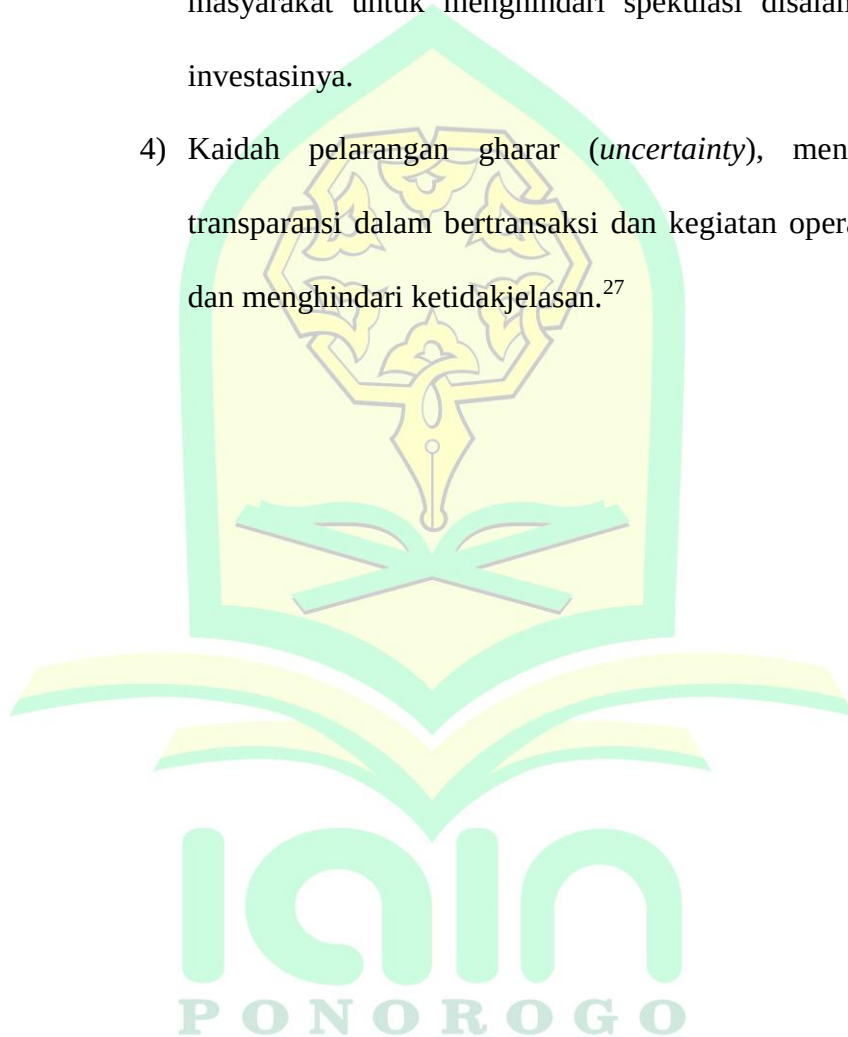
Memastikan pengelolaan perbankan dilakukan secara profesional dan kompetitif untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dalam tingkat risiko yang ditanggung oleh bank. Hal ini meliputi pelayanan yang cermat dan santun (*ri'ayah*) serta rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).²⁶

Dari perspektif makro, nilai-nilai syariah menuntut perbankan syariah untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Kaidah Zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- 2) Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap berani menghadapi risiko.

²⁶Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 190.

- 3) Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.
- 4) Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.²⁷



²⁷Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Vivapress Surabaya, 2011), 834.

BAB III

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, Indonesia berpotensi menjadi yang terdepan dalam keuangan syariah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap bahan halal dan dukungan *stakeholder* yang kuat menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem industri halal di Indonesia. Ekosistem industri halal Indonesia termasuk bank syariah. Bank syariah memainkan peran penting dalam semua kegiatan ekonomi ekosistem industri halal. Keberadaan sektor perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan dan perluasan jaringan menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ketahun. Bahkan, semangat untuk maju juga terlihat dari banyaknya bank syariah yang melakukan aktivitas korporasi. Tidak terkecuali bank syariah,

dengan bank BUMN Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.¹

Pada tanggal 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Indonesia atau yang bisa disebut dengan BSI. Penggabungan Bank Syariah ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perubahan induk (Bank Mandiri, BNI, dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian dan BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan dari ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan dari penggabungan Bank Syariah ini supaya menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan lil'alam*).²

¹www.Bankbsi.co.id (diakses pada tanggal 10 maret 2023, jam 11.00.

² Ibid.

Dengan adanya penggabungan dari ketiga Bank Syariah tersebut menjadi entitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI, hal ini menjadikan Bank Mandiri Syariah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.199, Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur berubah nama sekaligus menjadi kantor cabang pembantu Bank Syariah Indonesia yaitu PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Berdirinya sebuah lembaga keuangan perbankan tidak akan terlepas dari visi dan misi. Begitu juga dengan Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk yang melengkapi keberadaannya dengan mencanangkan visi dan misi sebagai berikut:³

a. Visi Bank Syariah Indonesia

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

Menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

³www.Bankbsi.co.id

b. Misi Bank Syariah Indonesia

- 1) Memberikan akses solusi terbaik keuangan syariah di Indonesia. Mampu melayani >20 juta nasabah dan menjadi top Bank berdasarkan asset (500+7) dan nilai buku 50 T pada tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia dengan nilai ROE sebesar 18% dan valuasi menguat sebesar PB>2.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Adapun struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani Nganjuk, sebagai berikut:⁴

No	Nama	Jabatan
1.	Sonny C. Rachmawati	<i>Branch Manager</i>
2.	Kadek deni Petra W.W	<i>Consumer Bussines RM</i>

⁴ Ellanda Safitri, Wawancara, 30 Maret 2023

3.	Johan Iskandar Dinata, Ro'sul Arief	<i>Consumer Bussines Staff</i>
4.	Muhammad Fajar	<i>Pawning Sales Officer</i>
5.	Putut Indratmoko	<i>Pawning Appraisal</i>
6.	Catur Budiawan	<i>Micro Staff</i>
7.	Ellanda Safitri	<i>Branch Operations & Service Manager</i>
8.	Bagus Setyo Nugroho	<i>Operational Staff</i>
9.	Endah Novianti	<i>Customer Service Representative</i>
10.	Uly Fatul Karimah	<i>Teller</i>

B. DATA

1. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk

a. Transparansi (Keterbukaan)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut OECD konsep GCG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang

berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Dalam menerapkan prinsip ini, perusahaan harus memberikan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingannya. Informasi yang diberikan meliputi kondisi keuangan, hasil keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Data diverifikasi menggunakan data yang dihasilkan secara independen. Pengungkapan informasi dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui posisi perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Candra sebagai berikut:

“sudah, jadi semuanya itu koordinasi antara satu dengan yang lain. Tujuannya agar lebih mudah dalam melayani nasabah dalam proses apapun”⁵

⁵ Candra, Wawancara 30 Maret 2023

Menurut keterangan Pak Candra, sebagai *Consumer*, prinsip transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah dapat menjalankan bisnisnya secara objektif dan rasional. Selain hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, pemangku kepentingan terkait syariah harus mengambil inisiatif untuk mempublikasikan hal-hal yang relevan dengan pengambilan keputusan syariah. Prinsip transparansi ini merupakan wujud implementasinya, yaitu keterbukaan informasi dalam bentuk publik dalam pemberian laporan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk kepada seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

Sesuai dengan pengamatan saya di Bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah menerapkan prinsip transparansi. Pada prinsip transparansi merepresentasikan keterbukaan dalam penyampaian informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk melaksanakan prinsip ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat

dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingannya. Informasi yang akan diberikan adalah posisi keuangan, hasil keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Informasi disebarluaskan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat.

b. **Accountability (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009. Akuntabilitas mengacu pada kejelasan pelaksanaan tugas dan kewajiban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Menurut OECD, prinsip ini dapat diimplementasikan dengan memperjelas tata kelola dan tanggung jawab lembaga perusahaan sehingga tata kelola perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Konsep GCG harus memastikan arah strategis perusahaan, pengawasan efektif manajemen perusahaan oleh komisaris dan akuntabilitas kepada perusahaan dan pemegang saham, dan dewan harus bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban badan perbankan agar pengelolaan berjalan efektif, dalam hal ini perbankan syariah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Jika prinsip ini

diikuti secara efektif, akan ada kejelasan mengenai tugas, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab pemegang saham, direksi dan dewan direksi.

“Sudah, jadi semuanya itu sudah dihitung data yang masuk baik laba, DPK, pembiayaan dan juga nasabah yang masuk dikita buka rekening termasuk itu sudah ada sistemnya sendiri. Jadi dalam sehari kita tau berapa yang buka rekening baru maupun user aktivasi m-banking semuanya sudah ada sistemnya sendiri”⁶

Berdasarkan pemaparan Bapak Candra selaku *Consumer*, bahwa prinsip akuntabilitas sudah terdapat sistemnya sendiri, jadi dalam sehari dapat kita ketahui berapa nasabah yang membuka rekening baru maupun user aktivasi m-banking.

“Untuk aspek *accountability* (akuntabilitas), bahwa karyawan PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah melakukan *job description* sesuai pedoman perilaku *Code of Conduct* (CoC). Karyawan yang melanggar sistem dan ketentuan akan diberikan sanksi dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada bank yang berupa sanksi administratif. Bagi karyawan yang melanggar akan langsung diberi teguran. Bisa jadi pada saat *briefing*, bisa jadi di ruangan manajer yang biasanya hanya membahas dan ditegur secara tertutup. Hal itu biasanya terkait masalah yang lumayan, namun masih ada beberapa karyawan yang tidak menyelesaikan *job description* dan membantu menyelesaikan tugas

⁶ Candra, Wawancara 30 Maret 2023

karyawan lainnya, namun sejauh ini masih bisa diatasi. Bukan hanya karyawan yang akan diberi teguran jika melanggar aturan, semua pihak baik manajer sekalipun. Teguran disini tergantung besar kesalahannya seperti akan diberi pembinaan, peringatan bahkan PHK. Namun sejauh ini di BNI Syariah setiap kecerobohan masih bisa diatasi dengan demokrasi”.⁷

Berdasarkan pemaparan Bapak Candra selaku *Consumer*, bahwa ada beberapa prinsip yang belum efektif yaitu pada prinsip akuntabilitas pada indikator masing-masing karyawan tidak menyelesaikan *job description* tetapi malah membantu menyelesaikan tugas karyawan lainnya. Namun sejauh ini masih bisa diatasi. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Menurut pengamatan saya di bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk, prinsip tanggung jawab belum dilaksanakan secara maksimal. Jika prinsip ini diterapkan secara efektif, peran, hak, tugas dan wewenang antara pemegang saham, direksi dan direksi akan diperjelas, karena dalam hal ini dewan pengawas syariah memiliki peran

⁷Candra, Wawancara 30 Maret 2023

penting. berada di bawah pengawasan perbankan syariah agar tetap beroperasi sesuai ketentuan. syariah

c. ***Responsibility (Pertanggungjawaban)***

Pertanggungjawaban (*responsibility*), Peraturan No. 33/11/PBI/2009 Bank Indonesia. Pertanggungjawaban artinya pengelolaan bank dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perbankan yang baik. Pada saat yang sama, menurut OECD, tanggung jawab dewan adalah tanggung jawab dewan atas arahan, pengendalian manajemen, dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam sistem tata kelola yang harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang diabadikan dalam undang-undang dan mendorong kolaborasi aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan tersebut untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, dan kelangsungan usaha. Menerapkan prinsip ini, harus diakui bahwa perusahaan juga memikul tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam kegiatan operasionalnya.

Pertanggungjawaban adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku dan prinsip-

prinsip pengelolaan perbankan yang baik. Adanya tanggung jawab administratif dalam manajemen, pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Menerapkan prinsip ini, perusahaan harus menyadari bahwa perusahaan juga berperan dalam kegiatan operasionalnya untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan menjamin hak-hak pemangku kepentingan

“InsyaAllah sudah, contohnya kita ada zakat yang disalurkan lewat BSI ke masyarakat umum, yayasan, bagi-bagi takjil saat bulan ramadhan, namun dihari-hari biasa belum ada”⁸

Aspek Tanggung Jawab (*Responsibility*) PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk telah memperhatikan pengambilan keputusan syariah. Prinsip keterbukaan ini juga merupakan wujud implementasinya, yaitu keterbukaan informasi dalam bentuk publik dalam menyalurkan dana zakat, sedekah (zis), infaq sesuai ketentuan. Menerapkan prinsip ini, harus diakui bahwa perusahaan juga memikul tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam kegiatan operasionalnya.

Prinsip pertanggungjawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang

⁸ Endah Novianti, Wawancara 30 Maret 2023

berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Sesuai dengan pengamatan saya di Bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

d. **Professional (Profesional)**

Profesional adalah kompeten, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan pihak manapun (independen) serta berkomitmen kuat terhadap pengembangan perbankan syariah.

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perbankan syariah harus dilakukan secara profesional dan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain untuk menghindari benturan kepentingan semaksimal mungkin. Sehingga sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas keuangan yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak, terutama yang dapat merugikan *stakeholders* dan yang dapat mengambil keputusan secara objektif.

Prinsip ini juga mensyaratkan perusahaan dikelola secara profesional, bebas dari benturan kepentingan dan bebas dari tekanan atau campur tangan siapapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini mensyaratkan bertindak secara independen dan tanpa tekanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seseorang. Prinsip ini mengandung arti bahwa pimpinan perusahaan harus tetap mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan perusahaan.

“Sudah, semuanya sudah diterapkan sesuai prosedur yang ada sudah mengikuti sesuai SOP, dan tidak ada front yang dilanggar selama ini. Terkait disiplin belum terjaga, masih ada yang belum tepat waktu terkait apel pagi, kemarin masih banyak yang tidak disiplin atau tidak mengikuti, besoknya juga begitu, terkait mengingatkan nasabah saat membayar pembiayaan kalau ditunda tetap akan meberatkan pekerjaan setiap masing-masing karyawan. Itu semua sangat penting terkait kedisiplinan yang harus dijaga karena dampaknya ke pekerjaan masing-masing karyawan khususnya ke diri masing-masing karyawan”⁹

Berdasarkan pemaparan Bapak Candra selaku *Consumer*, pada prinsip profesional dimana karyawan yang tidak disiplin perihal disiplin waktu serta ketidakhadiran ketika apel pagi berlangsung yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa

⁹Candra, Wawancara 30 Maret 2023

maksimal, namun sampai saat ini kendala tersebut masih bisa diatasi.

Sesuai dengan wawancara saya di Bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk belum menerapkan secara maksimal karena masih ada karyawan yang belum disiplin pada saat apel pagi sehingga mempengaruhi seluruh kegiatan di Bank.

e. ***Fairness*(Kewajaran atau Keadilan)**

Kewajaran adalah kesetaraan dalam pelaksanaan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut FCGI, prinsip keadilan ini mencakup perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, perilaku dan/atau kebijakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan pengungkapan informasi material, dan melarang pengungkapan orang dalam dan perdagangan saham. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam penyusunan peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas dan dalam merumuskan prinsip-prinsip operasional yang melindungi kepentingan minoritas. Perusahaan dari transaksi kepemilikan dan benturan kepentingan, penguatan peran dan tanggung jawab komisaris, direksi dan komisi, dan keadilan dalam representasi informasi

atau pengungkapan penuh semua materi, sehingga mempromosikan kesempatan kerja yang setara.

“Ya, sudah memberikan seluruh pihak-pihak untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat, baik diforum atau nasabah menyampaikan ke karyawannya”¹⁰

Berdasarkan pemaparan Bu Ellanda Safitri selaku *Branch Operatons* dan *Service Manager*, bahwa untuk aspek *Fairness* (Kewajaran atau Keadilan) PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah memberikan kesempatan kepada semua karyawan terkait keadilan dalam memberikan masukan serta menyampaikan pendapat.

Dari pengamatan saya di bank tersebut, PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk menerapkan prinsip *fairness* dengan menyediakan tempat bagi setiap karyawan untuk menyampaikan masukan dan pendapatnya. Prinsip ini mensyaratkan perlakuan yang adil dalam melaksanakan hak subjek data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap keadilan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat mengontrol dan memastikan perlakuan yang adil dari berbagai pemangku kepentingan di perusahaan. Implementasi Perusahaan

¹⁰Ellanda Safitri, Wawancara 30 Maret 2023

atas kebijakan ini melarang praktik-praktik internal yang memalukan dan merugikan pihak lain.

2. **Faktor Pendukung Dan Penghambat Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk**

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk tercermin dalam penerapannya untuk mencapai visi dan misi Bank, dan penerapan GCG dimulai di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk setelah keberadaan Bank. Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini, perintah dari kantor pusat umumnya ditransfer ke cabang untuk dieksekusi.

Demi mencapai visi dan misi suatu perusahaan sangat bergantung pada penerapan *Corporate Governance* pada setiap pihak manajemen atau organisasi. Namun pada penerapan GCG juga tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadikan penerapan itu berjalan dengan lancar maupun faktor yang menjadi penghambat pada kelancaran tata kelola manajemen setiap perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG tidak terlepas dari kepatuhan para pelaku usaha terhadap manajemen yang baik dan kepatuhan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, termasuk aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, perangkat hukum Bank Indonesia, serta peraturan

hukum internal bank dan tidak terlepas dari persepsi bank pengelolaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG antara lain:transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, kewajaran dan profesionalisme dalam tata kelola perbankan. Perihal ini kemudian peneliti konfirmasi dengan PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk. Berdasarkan pemaparan dari Bu Ellanda Safitri selaku *Brand Operations* dan *Service Manager* menerangkan:

“Untuk faktor pendukung, seperti sistem di BSI itu sudah baik, ada sistem baru pada m-banking itu seperti punya bank mandiri lebih dari livin, namun untuk produk kita lengkap malah lebih banyak dari bank konvensional, keterbukaan dalam menciptakan komunikasi yang baik dari seluruh karyawan. Bank BSI memiliki daya tarik tersendiri bagi umat muslim karena Bank BSI menerapkan prosedur sesuai syariat islam. Kalau penghambat itu mungkin karena dari kantor cabang itu masih sedikit di setiap kota ada, tapi cuma satu atau dua disini, untuk ATM BSI hanya ada di kota kalau didesa belum ada, lokasi masih terbatas, karena Bank BSI masih baru sehingga banyak yang belum mengetahui apa itu bank syariah sehingga kita masih mencari jati diri dimasyarakat, contohnya kita mengadakan event-event”¹¹

Berdasarkan pemaparan dari Bu Ellanda Safitri selaku *Brand Operations* dan *Service Manager*, bahwa untuk faktor pendukung seperti Keakuratan dan keterbukaan dalam menciptakan komunikasi yang baik dari seluruh karyawan, sistem di BSI itu sudah baik, ada

¹¹Ellanda Safitri, Wawancara 30 Maret 2023

sistem baru pada m-banking itu seperti bank mandiri lebih dari livin, namun pada Bank BSI produk lebih banyak dibandingkan Bank konvensional. Bank BSI memiliki daya tarik tersendiri bagi umat muslim karena Bank BSI menerapkan prosedur sesuai syariat islam.

Faktor penghambat dalam penerapan GCG di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk dari kantor cabang tersebut masih sedikit di setiap kota ada, namun hanya satu atau dua kantor cabang BSI, untuk ATM BSI hanya ada di kota sedangkan di desa belum ada, lokasi masih terbatas, karena Bank BSI masih baru sehingga banyak yang belum mengetahui apa itu bank syariah sehingga kita masih mencari jati diri di masyarakat, contohnya kita mengadakan event-event.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk *Good Corporate Governance* mulai diterapkan pada Bank PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk yaitu sejak adanya peraturan dari Bank Indonesia bagi Bank Umum Syariah. Dalam penerapan GCG ini telah diterapkan dengan benar walaupun ada beberapa masalah yang terjadi baik itu dari dalam bank ataupun dari luar bank. Namun setiap masalah utamanya tidak terlalu serius dan masih bisa terselesaikan.

3. Dampak Dari Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* merupakan metode yang digunakan untuk mendominasi hubungan yang terjadi antara pemangku kepentingan, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atau dapat dikatakan bahwa GCG adalah sistem yang fokus pada pengendalian system kinerja perusahaan. Penerapan GCG di era saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat, dan dapat menerapkan etika dalam bisnis secara konsisten.

Penerapan GCG pada lembaga lembaga keuangan sangat penting untuk dilakukan, karena GCG dapat dijadikan sebagai sebuah aturan dan sistem dalam mengelola dan menjalankan suatu lembaga keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga tersebut. GCG jika diterapkan dengan konsisten. Maka akan berdampak positif terhadap keberlangsungan sebuah lembaga keuangan terutama dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Penerapan GCG secara konsisten akan memberikan dampak yang baik bagi lembaga tersebut dan secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja karyawan, karena GCG meliputi hal-hal seperti, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian dan kewajaran, yang semuanya sesuai dengan syariah islam. Akibatnya dengan GCG akan menghasilkan budaya kerja yang baik sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah untuk dicapai. Budaya kerja yang baik akan dapat membangun lingkungan kerja yang dinamis dan profesional. Dengan menerapkan GCG juga akan membantu meningkatkan kepemimpinan dan sistem organisasi. Jika hal tersebut dipertahankan maka akan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal akan dapat menaruh kepercayaannya pada perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang terkait dengan implementasi GCG pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk, beliau Bu Uly Fatul Karimah selaku *Teller* mengatakan:

“Untuk dampak, Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki dampak positif pada kinerja karyawan pada BSI KCP A Yani Nganjuk semakin baik penerapan GCG maka semakin meningkat pula kinerja karyawan. misalnya terkait dengan prinsip keadilan atau kesetaraan kami memberikan hak karyawan secara proporsional, karyawan dapat berpartisipasi dalam kegiatan bank. Karyawan yang melaksanakan tugas dengan baik dan hasil yang memuaskan akan kami berikan reward atau penghargaan, karyawan disini dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan kemampuan dan perilaku mereka

dalam menerapkan GCG secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kinerja mereka.”¹²

Berdasarkan pemaparan Bu Uly Fatul Karimah selaku Teller, bahwa untuk dampak positif pada kinerja karyawan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk yang sudah semakin baik dalam penerapan *Good Corporate Governance*, yang menjadikan kinerja karyawan di Bank tersebut semakin meningkat, misalnya terkait dengan prinsip keadilan atau kesetaraan yang memberikan hak karyawan secara proporsional, seperti memberikan *reward* atau penghargaan kepada karyawan disini dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka serta kemampuan dan perilaku mereka dalam menerapkan GCG secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kinerja mereka.

Secara teoritis, penerapan GCG akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja suatu perusahaan termasuk kinerja karyawan, dengan tata kelola perusahaan yang baik maka profitabilitas dan citra perusahaan akan meningkat, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan untuk memenangkan persaingan secara global. Fungsi dan system GCG dapat membantu perusahaan

¹²Uly Fatul Karimah Wawancara 30 Maret 2023

dalam memperkuat fondasi untuk kinerja perusahaan, dan melindungi perusahaan dari kesulitan keuangan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, manajemen perusahaan lebih mementingkan pencapaian tujuan manajemen daripada melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pencapaian tujuan kinerja manajemen.



BAB IV
ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT
BANK SYARIAH INDONESIA KCP AHMAD YANI NGANJUK

A. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank
Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk

Menurut tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengendalian dan pengaturan suatu perusahaan, yang tercermin dalam mekanisme (*hard definition*) dan kondisi hubungan antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam mekanisme kontrol itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/8/2006 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Perubahan Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, susunan dan pengaturan dasar hukum GCG di sektor perbankan dimana GCG adalah bank . Manajemen yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan keadilan.

Adapun model *Corporate Governance* dalam perspektif Islam, terdapat beberapa studi yang telah dilakukan khususnya pada lembaga keuangan Islam. Studi tersebut mengacu pada model tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip konsultasi yang menegaskan bahwa semua *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu tauhid atau

keesaan Allah. Dalam konteks Islam, kepentingan *stakeholder* bukan hanya seputar *return finansial* atau memaksimalkan keuntungan, tetapi kepentingan tersebut juga meliputi unsur etikadan syariah. Perusahaan islam memiliki nilai *corporate governance* yang berbeda dengan konsep *corporate governance* barat. Sebagai dasar iman Islam adalah tauhid. Prinsip tauhid menurunkan konsep khilafah dan keadilan atau keseimbangan. Prinsip keseimbangan sosial dalam konteks ekonomi memberikan yang terbaik pada produksi, konsumsi, distribusi. Dalam konteks ini, kebutuhan dan kesejahteraan anggota perusahaan merupakan prioritas pertama di atas individu.

Corporate governance merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi. Kebutuhan akan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen bank. Kebijakan *good governance* harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan.

Tata kelola perusahaan yang baik atau tata kelola yang baik dipraktekkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai dan mencapai tujuan perusahaan dengan visi dan misi yang telah disetujui dapat dipertahankan bahkan dikembangkan dan diselesaikan pada hal-hal

yang berkaitan dengan penerapan GCG di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani.

Berdasarkan paparan data diatas bahwa Bank telah menerapkan prinsip GCG.dalam diri masing-masing karyawan juga telah ditanamkan prinsip-prinsip GCG sebab ketika prinsip tersebut dilaksanakan membuat suatu perusahaan lembaga perbankan syariah akan dapat meningkatkan hasil kinerja sehingga mendapat hasil yang maksimal.

Karyawan yang melaksanakan prinsip GCG membuat perusahaan atau lembaga perbankan syariah akan membuat investor percaya lagi untuk kembali memberi modal kepada perusahaan, serta GCG akan membuat para pemegang saham mempunyai rasa bangga akan kinerja tata kelola dan hasil perusahaan atau lembaga perbankan syariah yang telah dicapai.

1. Tranparansi (*transparency*)

Untuk aspek *transparency* (keterbukaan) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad yani Nganjuk menurut Bapak Candra selaku *Consumer* mengatakan bahwa penerapan *transparency* telahdilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, seperti laporan– laporan ke kantor pusat sudah dilaporkan sesuai dengan prosedur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Nasabah juga bisa mengakses neraca dan laporan keuangan yang sudah diaudit

tergantung kepentingan yang diinginkan. Serta sistem kerja, kebijakan dan laporan kinerja sudah dilaporkan ke Bank Indonesia, kantor pajak dan OJK (Otoritas Jasa keuangan).

Dari pemaparan Bapak Candra selaku *Consumer*, bahwa prinsip transparansi diperlukan bagi badan usaha syariah untuk menjalankan usahanya secara objektif dan waras. Badan usaha Syariah harus secara proaktif mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan Syariah. Prinsip transparansi ini juga merupakan bentuk implementasinya yaitu keterbukaan informasi berupa keterbukaan dalam pemberian laporan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk kepada segenap *stakeholder*-nya. Apa yang dijelaskan tersebut sejalan dengan Prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.

2. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Untuk aspek *responsibility* (tanggung jawab), menurut Endah Novianti selaku *Customer Service Representative* mengatakan bahwa PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah patuh terhadap segala regulasi yang diberikan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah, sudah mengupayakan

kesejahteraan karyawannya dengan memberikan fasilitas jaminan social dan Kesehatan serta sudah menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah sesuai dengan ketentuan. Untuk kesejahteraan karyawan PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk ini biasanya mereka dibuat nyaman mungkin untuk bekerja di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk ini. Artinya dari kesejahteraan disini adalah tanggung jawab manajemen pada kenyamanan kerja setiap karyawannya. Seperti fasilitas yang memadai dikantor, akses internet yang cepat, dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan pemaparan Bu Endah Novianti selaku *Customer Service Representative*, bahwa untuk aspek *responsibility* (tanggung jawab) PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk mengupayakan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, serta menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) sesuai ketentuan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan membantu perusahaan menyadari bahwa dalam operasinya juga memiliki peran yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingannya.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Untuk aspek *accountability* (akuntabilitas), menurut Bapak Candra selaku *Consumer* berpendapat bahwa karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk menulis deskripsi

pekerjaan sesuai dengan *Code of Conduct* (CoC). Pegawai yang melanggar sistem dan peraturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Standar Pelayanan (SOP) Bank berupa sanksi administratif. Pelanggar akan langsung ditegur atau bisa bertemu langsung dengan kepala dinas BSI. Bisa di briefing, bisa juga di ruangan manager, yang sering hanya adu mulut dan dibentak-bentak secara pribadi. Ini biasanya masalah yang cukup kecil, tetapi sejauh ini telah diselesaikan.

Pemaparan Bapak Candra selaku *Consumer*, bahwa ada beberapa prinsip yang belum efektif yaitu pada prinsip akuntabilitas pada indikator masing-masing karyawan tidak menyelesaikan *job description* tetapi malah membantu menyelesaikan tugas karyawan lainnya. Namun sejauh ini masih bisa diatasi. Jika prinsip ini diterapkan secara efektif, akan ada kejelasan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tanggung jawab antara pemegang saham, direksi dan direksi.

4. Profesional (*professional*)

Untuk aspek profesional menurut Bapak Candra selaku *Consumer* semuanya sudah diterapkan sesuai prosedur yang ada sudah mengikuti sesuai SOP, dan tidak ada *front* yang dilanggar selama ini. Terkait disiplin belum terjaga, masih ada yang belum tepat waktu terkait apel pagi, kemarin masih banyak yang tidak

disiplin atau tidak mengikuti, terkait mengingatkan nasabah saat membayar pembiayaan kalau ditunda tetap akan meberatkan pekerjaan setiap masing-masing karyawan. Itu semua sangat penting terkait kedisiplinan yang harus dijaga karena dampaknya ke pekerjaan masing-masing karyawan khususnya ke diri masing-masing karyawan.

Berdasarkan pemaparan Bapak Candra selaku *Consumer*, pada prinsip profesional dimana karyawan yang tidak disiplin perihal disiplin waktu serta ketidakhadiran ketika apel pagi berlangsung yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa maksimal, namun sampai saat ini kendala tersebut masih bisa diatasi.

5. *Fairness* (kewajaran)

Untuk aspek *fairness* (kewajaran) menurut Bu Ellanda Safitri selaku *Branch Operatons dan Service Manager*. mengatakan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu sudah memperhatikan kepentingan *stakeholders* mengenai rasio bagi hasil. Serta sudah mempertimbangkan pelaksanaan *reward dan punishment* untuk karyawan yang berprestasi ke kantor pusat karena kantor pusatlah yang berwenang menyetujuinya.

Berdasarkan pemaparan Bu Ellanda Safitri selaku *Branch Operatons dan Service Manager*, bahwa untuk aspek *Fairness* (Kewajaran atau Keadilan) PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad

Yani Nganjuk sudah memberikan kesempatan kepada semua karyawan terkait keadilan dalam memberikan masukan serta menyampaikan pendapat.

Berdasarkan diatas dan teori yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa karyawan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk dikatakan telah menerapkan prinsip GCG. Dalam hal ini karyawan dikatakan telah menerapkan prinsip GCG, karena semua prinsip telah dilaksanakan namun beberapa prinsip masih belum dilaksanakan secara maksimal seperti prinsip akuntabilitas yaitu pada masing-masing karyawan tidak menyelesaikan *job description* tetapi malah membantu menyelesaikan tugas karyawan lainnya, dan prinsip profesional pada karyawan yang tidak disiplin perihal disiplin waktu serta ketidakhadiran ketika apel pagi berlangsung sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak bisa maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari ketaatan pengelola usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia, serta aturan hukum internal perbankan dan tidak terpisah dengan kesadaran pengelola perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, profesional, serta kewajaran perbankan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan maupun yang menjadi penghambat berjalannya pengelolaan masing-masing perusahaan. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan GCG.

Good Corporate Governance pada bank dan nasabah penggunaan dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan, GCG justru menjadi unsur kelemahan terutama pada perusahaan di Negara berkembang. Hal penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik. Kesenjangan informasi sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman, dan undang-undang meskipun pada tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen.

Sangat penting bagi bank untuk mengetahui dan memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan hambatan setiap aktivitas perbankan. Apabila perbankan dapat mengetahui faktor-faktor

tersebut maka perbankan dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik.

Berdasarkan teori mengenai faktor pendukung dan faktor Pengambat *Good Corporate Governance* yaitu seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik *corporate governance* dengan karakter investasi internasional saat ini. maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jika perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan *investor domestik* terhadap perusahaan.

Dalam hal penerapan prinsip *Good Corporate Governance* harus disadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Masalah-masalah yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk masih bisa diatasi dengan cara demokrasi dengan mencari titik tengah dari setiap problem yang dialami karyawan dalam menjalankan tugas, dan tidak mempengaruhi margin perusahaan.

Kalau dikatakan faktor pendukung agar penerapan *Good Corporate Governance* ini bisa sukses menurut saya yang terpenting itu komunikasi yang baik dari seluruh karyawan dan pengawasan yang ekstra. Karena dengan adanya pengawasan dari pihak audit yang efektif dalam perusahaan untuk meminisir setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Sedangkan faktor penghambatnya biasanya sering terjadi di luar perusahaan, seperti kurang efektifnya nasabah dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga menyulitkan karyawan kami dalam menyelesaikan tugasnya.

Faktor pendukung penerapan *Good Corporate Governance*, Bu Ellanda Safitri selaku *Branch Operations dan Service Manager* mengatakan bahwa sistem audit (pemeriksaan) pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Hal ini sangat dibutuhkan pada setiap lembaga supaya tercapainya tujuan perusahaan dalam mencapai margin yang ditargetkan.

Untuk faktor penghambat dalam penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk ini Bu Ellanda Safitri selaku *Branch Operations dan Service Manager* mengatakan bahwa faktor penghambat dalam penerapan GCG di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk dari kantor cabang masih sedikit di setiap kota, namun, untuk ATM BSI hanya ada di kota

sedangkan didesa belum ada, lokasi masih terbatas, banyak yang belum mengetahui apa itu bank syariah sehingga kita masih mencari jati diri dimasyarakat, contohnya dengan mengadakan event-event.

Segala kegiatan operasional perbankan dapat terlaksana dengan baik diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang mendorong. Namun demikian adapula pelaksanaan yang belum berjalan dengan maksimal yang disebabkan beberapa faktor penghambat.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan bahwa faktor pendukung dan penghambat GCG di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk. Untuk faktor pendukung, seperti:

1. Sistem di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah baik.
2. Adanya sistem baru pada m-banking Bank Mandiri yaitu Livin by Mandiri.
3. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk lebih banyak dari bank konvensional lainnya..
4. Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk memiliki daya tarik tersendiri bagi umat muslim karena Bank BSI menerapkan prosedur sesuai syariat islam.

Sedangkan faktor penghambat yaitu:

1. Kantor cabang Bank Syariah Indonesia masih sedikit.
2. Untuk ATM Bank Syariah Indonesia hanya terdapat dikota
3. Lokasi kantor Bank Syariah Indonesia masih terbatas.
4. Bank Syariah Indonesia masih tergolong baru sehingga banyak yang belum mengetahui mengenai Bank Syariah dan masih dalam upaya mencari jati diri dimasyarakat, contohnya dengan mengadakan event-event.

C. Analisis Dampak dari Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk

Pada dasarnya tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu cara untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan dalam hal hak dan kewajiban, atau dapat dikatakan bahwa GCG adalah suatu sistem yang menitikberatkan pada pengelolaan sistem kinerja perusahaan. Penerapan GCG sangat penting di masa sekarang ini agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya dalam situasi bisnis yang sulit dan senantiasa menerapkan etika dalam bisnisnya.

Penerapan GCG secara konsisten memberikan dampak positif bagi institusi dan secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai karena GCG menunjukkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan kewajaran yang sejalan dengan syariat Islam.

Dengan demikian, GCG memastikan terciptanya budaya kerja yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah. Budaya kerja yang baik menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan profesional.

FCGI telah membuktikan bahwa tata kelola perusahaan membawa banyak manfaat bagi perusahaan seperti: Meningkatkan efisiensi bisnis melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan lebih meningkatkan layanan pemangku kepentingan, serta memfasilitasi pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku karena faktor kepercayaan. yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan. Dengan mengembalikan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, pemegang saham puas dengan kinerja perusahaan karena meningkatkan nilai pemangku kepentingan dan dividen. Penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga-lembaga keuangan sangat penting untuk dilakukan, karena GCG dapat dijadikan sebagai sebuah aturan dan sistem dalam mengelola dan menjalankan suatu lembaga keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga tersebut. GCG jika diterapkan dengan konsisten. Maka akan berdampak positif terhadap keberlangsungan sebuah lembaga keuangan terutama dalam meningkatkan kinerja karyawan

Implementasi GCG juga memberikan kontribusi dalam perbaikan manajemen dan sistem organisasi. Jika hal ini dipertahankan, maka akan membawa manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dapat mempercayai perusahaan.

GCG dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja bisnis. Hal ini dikarenakan pengelolaan perusahaan oleh para eksekutif perusahaan yang menerapkan Prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan laba perusahaan dan nilai saham perusahaan. Pasca krisis 2008, banyak penelitian GCG dilakukan di perbankan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja dan memahami permasalahan keagenan di sektor perbankan.

Secara teori, penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk kinerja karyawan. Tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan profitabilitas dan citra perusahaan sehingga nilai perusahaan untuk keuntungan global dapat dimaksimalkan. Kompetisi Kegiatan dan sistem GCG dapat membantu perusahaan memperkuat fondasi aktivitas bisnisnya dan melindungi perusahaan dari kesulitan keuangan di masa depan. Dalam hal ini manajemen lebih mementingkan pencapaian

tujuan manajerial daripada kegiatan yang tidak berkaitan dengan pencapaian tujuan kinerja manajerial.

Penerapan GCG di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk mampu mengubah kinerja pegawai yang sebelumnya buruk menjadi baik. Hal ini disebabkan adanya perubahan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam aktivitas keseharian pegawai. Nilai-nilai ini memengaruhi perilaku setiap individu karyawan dan pada akhirnya meningkatkan laba.

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan GCG pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuki berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuki. Semakin baik penerapan GCG maka semakin baik pula kinerja pegawai. Misalnya, sesuai asas fairness atau keadilan, kita memberikan hak kepada pekerja secara proporsional, pekerja dapat melakukan transaksi perbankan.

Kami menghargai karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan. Karyawan yang bekerja di sini bekerja secara profesional dan mandiri serta secara tidak langsung meningkatkan kinerjanya melalui kemampuan dan perilakunya dalam penerapan GCG.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk telah diterapkan. Akan tetapi ada beberapa prinsip yang belum maksimal seperti prinsip akuntabilitas dan profesional, serta terus menjaga dan mengembangkan kemajuan PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk.
2. Dalam penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Faktor Pendukung

Transparansi dalam menciptakan komunikasi yang baik dari seluruh karyawan, Produk di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk sudah lengkap bahkan lebih banyak dari Bank konvensional, dan Bank BSI memiliki daya tarik tersendiri bagi umat muslim karena menerapkan prosedur sesuai syariat islam.

b. Faktor Penghambat

Ketidakefisienan pelanggan dalam menjalankan tanggung jawabnya membuat karyawan sulit menyelesaikan tugasnya, Kantor cabang Bank BSI masih sedikit dan hanya ada di kota, sedangkan di Desa belum ada dikarenakan lokasi terbatas. Begitupun dengan ATM BSI yang hanya ada di Kota, Bank BSI yang masih baru sehingga banyak yang belum mengetahui apa itu Bank Syariah sehingga kita masih mencari jati diri dimasyarakat, contohnya dengan mengadakan event-event.

3. Dampak dari penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk memiliki dampak positif pada kinerja karyawan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk yang semakin baik serta kinerja karyawan semakin meningkat. Terkait dengan prinsip keadilan atau kesetaraan kami memberikan hak karyawan secara proporsional, karyawan dapat berpartisipasi dalam kegiatan bank. Karyawan yang melaksanakan tugas dengan baik dan hasil yang memuaskan akan kami berikan reward atau penghargaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Nganjuk maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Diantaranya, bagi para investor penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan syariah dengan memperhatikan hasil penerapan GCG. Bagi para pemegang saham dan manajemen perbankan syariah, sebagai masukan dalam mengembangkan praktik GCG berdasarkan perspektif Islam
2. Menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja dan nilai perusahaan serta diharapkan dapat menjadi referensi terutama dalam bidang perbankan, dan mendorong penelitian yang lebih lanjut mengenai GCG.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Arif M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Anwar, Eng Saiful, *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Awar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Badruzaman, Jajang dan Kusmayadi, Dedi, Rudiana, Dedi, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).
- Beasley M.S., dan Jusuf A.A, Arens, A.A, Elder R.J.,. *Auditing And Assurance Services, An Integrated Approach*, 12th ed., (Pearson Prentice Hall: Jakarta, 2008)
- Elan, Umi dan Rusdiyanto, Susetyorini, *Good Corporate Governane:Teori dan Implementasinya diIndonnesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2019).
- Ghony Djunaidy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012).
- Gunawan, 'Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik', (Jakarta: Bumi Aksara, 2014.).
- Hastuti, Theresia Dwi. Hubungan antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta), (*Simposium Nasional AkuntansiVIII*, 2005)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko* (Jakarta: GramdiaPustaka Utama, 2016).
- K, Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi islam*, (Jl Sultan Alauddin:AlauddinUniversity Press, 2014).

- Lastanti, Hexana Sri, “Hubungan Struktur *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar”. (Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun *Good Corporate Governance*, 2004).
- M. W , Laksana, *Psikologi Komunikasi; Membangun Komunikasi yang Efektif Dalam Interaksi Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Moh. Miftachul Choiri dan Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Murni,Wahid, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*,(Malang: UM Press, 2008).
- Najmudin, *Manajemen Keuangan:Akuntansi Syar’iyyah Modern*, (Yogyakarta:Andi Ofset,2011).
- Nawawi Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Vivpress Surabaya, 2011).
- Rahmadi, Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital*.(Yogyakarta: Salemba Empat, 2018).
- Setiawan Budi Utomo & Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan DinamikaPerkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikaasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008).
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Skripsi

- Astuti, Wahyu Indri “Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Bni Syariah Kcp Langkat Stabat” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara”, (2021).
- Ermawati Elly “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kspps Berkah Mitra Hasanah Studi Kasus Pada Kspps Berkah Mitra Hasanah” Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019).
- Musimah Siti “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2021).
- Nahriyah, Rizqi Maknunatun “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Reformasi Birokrasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2017” Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negei Sunan Kalijaga Yogyakarta”, (2019).
- Nasution Jamilah “Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Muamalat Kc Medan Balai Kota” Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2020)

Jurnal

- Amelia Cahyadi, Zahra Shafira Belanusa, R Kartikasari “Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan *Participating Interest*” Jurnal Jurisprudence Volume 10 Nomor 1, (2020)
- Aprianingsih, Astri, “Pengaruh Penerapan *Good Corporae Governance* StrukturKepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja KeuanganPerbankan”, *Jurnal Profita Edisi 4*, 2016.
- Caylor, M & Brown, L,. “*Corporate governance and firm valuation*”. *Journal of Accounting and Public Policy*, Volume 2, Nomor 5, (2006).
- Deviyanti, Kusumo Bintoro “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah

- Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM)” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Volume 6 Nomor 6, (2021)
- Dewi, Putri Indar “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah” Jurna At-Tsarwah Volume 3 Nomor 2, (2020)
- Harwening Sindu Lestari, Livia Ambarsari, Koiirul Anwar, Setyo Budi Hartono “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance*” Jurnal At-Taqaddum Volume 12 Nomor 2, (2020).
- Herlyanto, Fredy Dwi “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah Dalam Mencapai *Maqashid Syariah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” El Muhasaba: Jurnal Akuntansi Volume 11 Nomor 1, (2020)
- Innesa dan Klapper, “*Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets*”. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10, No. 5, 2004.
- Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Volume 13, Nomor1, (2017).
- M. M. Schmid dan Amman, M., D. Oesch, “*Corporate Governance and Firm Value: International Evidence*”, *Journal of Fianancial Intermediation*, Volume 5, nomor 1, 2010.
- Maria, E, Setyorini, H.B, Kandungan Nitrat dan Fosfat Di Pantai Jungwok, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, ISSN 1978–1652, Volume 13, Nomor 1, (2019).
- Mutia Hardika, Istifar Dilla Hadistya “Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Bank Central Asia Tbk” Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 2, (2021)
- Ningseh, Ayu Ribut Sri Wahyuni “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia” Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Volume 5 Nomor 2, (2021).
- Rianto, Ignatius Edward, “Pengelolaan Manajemen Modern Dalam *Mewujudkan Good Corporate Governance*: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan” *Binus Business Review*, vol. 5. No. 1 (2014).
- Rizayusmanda “urgensi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kegiatan Perbankan Syariah” Volume 18 Nomor 1, (2020).

- Rully Siti Wadih dkk, “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NO.11/33/PBI/2009”, *Jurnal Nisbah*, Volume 1, Nomor 2 (2015).
- Rully Trihantana, Rivan Abdurrahman, “Persepsi Praktisi Perbankan Syariah Mengenai Penerapan Teknologi Preauthorized Debit sebagai Fee Based Income pada Bank Syariah”, *Jurnal Nisbah*, Volume 1 nomor 2, (2016).
- Soekarno Adrian “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang” *Jamswap: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Volume 4 Nomor 4, (2019).
- Triani Ratnawuri, Pritandani dan Meyta Pritandhari, "Analisis Pembelajaran Monopoli Ekonomi (Monokomi) pada Siswa *Boarding School*," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2 (2018).
- Tyas, Novia Sarwoning “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga Pt. X” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi* Volume 1 Nomor 3, (2020).
- Usman, Husaini, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

Wawancara

- Candra, Wawancara 30 Maret 2023
- Karimah, Uly Fatul, Wawancara 30 Maret 2023
- Novianti Endah, Wawancara 30 Maret 2023
- Safitri Ellanda, Wawancara, 30 Maret 2023
- Saputra Praja, Wawancara, 1 Oktober 2023

Website

- FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance))*, Jilid Kedua (Jakarta: Seri Tata Kelola Perusahaan, 2000).
- PBI, *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: BI, 2009)

www.Bankbsi.co.id